



Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 5

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Korupsi Pemprov DKI Disorot

Tokoh Nasional Desak Tiga Kasus Korupsi Besar di Ibu Kota Diusut

LAMBANYA penegakan hukum terhadap sederet kasus dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, membuat sejumlah tokoh nasional 'turun gunung' mendesak kasus-kasus yang terjadi di Ibu Kota dan merugikan keuangan negara ratusan miliar itu diusut tuntas.

Tidak tanggung-tanggung, nama beken seperti mantan Panglima TNI, Djoko Santoso; tokoh Malari Hariman Siregar; mantan Wakil Gubernur DKI, Prijanto; Jaksa Limbong; tokoh pemuda, Bursah Zarnubi, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adi Masardi; Pengamat Jakarta, Amir Hamzah dan Sugiyanto, serta puluhan tokoh lainnya, berkumpul untuk mendorong penegakan hukum.

Mereka mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi kakap yang terjadi di Ibu Kota ■

Yakni, dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) senilai Rp 800 miliar, dugaan korupsi lahan BMW senilai Rp 737 miliar, dan korupsi *uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp 300 miliar segera dituntaskan pengusutannya.

"Pengungkapan dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, taman BMW, dan UPS yang terjadi di DKI membuat saya lahir batin mendukung untuk segera dituntaskan," ujar Djoko yang menjabat Panglima TNI periode 2007-2010 saat berkumpul bersama para tokoh dalam sidang Mahkamah Intelektual 'Mengupas Dugaan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta' yang digelar di Jalan Karang Bolong, Jakarta Utara, Sabtu (29/8) sore.

Djoko mengatakan, dirinya sengaja mengenakan pakaian berwarna hitam-hitam, sebagai simbol keprihatinan terhadap lambannya penegakan hukum di Ibu Kota negara. Menurutnya,

seperti kasus korupsi Taman BMW yang sudah diketahuinya sejak beberapa tahun lalu, dan bahkan telah dilaporkan ke penegak hukum.

Namun, sampai saat ini belum juga ada tindakan dari aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut. Hingga kemudian kembali muncul dugaan korupsi proyek UPS dan pembelian lahan RSWW yang hingga kini juga tidak diungkap tuntas. "Saya sekarang warga negara biasa, namun tetap punya kewajiban untuk ikut mendorong tegaknya supremasi hukum," ungkapnya juga.

Sedangkan tokoh Malari, Hariman Siregar mengaku mengamati kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov DKI itu lantaran kuatnya intervensi pemodal dalam pemerintahan yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sebut saja dugaan korupsi taman BMW yang melibatkan pengembang perumahan raksasa. Kemudian juga kasus reklamasi di pantai Utara Jakarta, yang juga melibatkan raksasa properti yang sama, serta dugaan korupsi RSSW, semua jika ditelisik sangat kuat hubungannya dengan pemilik modal.

"Menghadapi kondisi ini maka *civil society* harus diperkuat dan didukung. Sebab kini *rule of law* tidak ada. Semua aturan ditabrak demi kekuasaan dan uang. Demokrasi sudah dibajak dan yang pantas menjadi pemimpin yang mendapat restu dari kelompok pemilik modal seperti kasus Taman BMW yang menjadikan dana Rp 735 miliar jadi bancakan," papar Hariman juga.

Kemudian, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2014 sudah sah sebagai bukti awal bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pengangsan uang negara tersebut. "Sebaiknya KPK tidak ragu lagi

(menyelidik)," desaknya.

Sedangkan Mantan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Prijanto, menilai Pemprov DKI tidak memiliki niat menuntaskan kasus korupsi di Ibu Kota. Salah satunya dalam kasus dugaan kasus korupsi proyek Taman BMW. Menurutnya kasus korupsi Taman BMW sudah diketahui oleh gubernur, namun sengaja djabaikan atau dibiarkan.

"Kami menduga telah terjadi kesepakatan antara penyelenggara negara dengan pengembang yang menghasilkan BAST (Berita Acara Serah Terima) dengan SPH (Surat Pelepasan Hak)-nya, dan masuknya Taman BMW dalam aset Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.

Dia juga menegaskan kehadirannya sebagai pelapor kasus dugaan korupsi Taman BMW di Mahkamah Intelektual yang digelar di Jakarta Utara ini, bukan serta merta dirinya ingin naik lagi dalam panggung dunia politik di Jakarta.

"Sesungguhnya Mahkamah Intelektual bukan kali ini saja, tapi sudah tiga kali digelar. Kalau saya mau ungkap lagi masalah ini, bukan saya mau naik panggung lagi dalam pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017 nanti. Namun semata-mata demi penegakan hukum. Biar langit runtuh hukum harus ditegakan," cetusnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sejauh ini belum memberi tanggapan terkait berkumpulnya para tokoh nasional yang mengkritisi kinerja pemerintahannya tersebut. Namun, dalam beberapa kesempatan orang nomor satu di Ibu Kota ini menegaskan keseriusannya dalam memberantas korupsi.

Hal itu ditandai dengan melakukan program baru dengan bekerjasama dengan KPK untuk mencegah terjadinya korupsi yang semakin menggerogoti anggaran negara. "Program terbaru kami adalah kerjasama dengan KPK, kami mau bikin training. Jadi anak kecil dilatih mengetahui hal-hal

anti korupsi," ujarnya.

Menurutnya, ini cara dalam mendeteksi dini potensi perilaku korupsi pada anak. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan adanya pendidikan sejak dini tentang korupsi sangatlah penting supaya membebaskan para peserta didik dari pikiran dan perilaku manipulatif. (wok)



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indo Pos	Pos Kota		Warta Kota

SUBBAGIAN HUMAS



Kasus Korupsi 'Kakap' di Ibu Kota

- 1. Proyek Pembelian Lahan RSSW**
 Nilai Proyek : Rp 800 miliar
 Dugaan Kerugian Negara : Rp 191 miliar

- 2. Proyek Pengadaan UPS**
 Nilai Proyek : Rp 300 miliar
 Dugaan Kerugian Negara : Rp 50 miliar

- 3. Proyek Lahan Taman BMW**
 Nilai Proyek : Rp 737 miliar
 Dugaan Kerugian Negara : Rp 200 miliar



PURWOKO/INDOPOS

USUT TUNTAS: Suasana Mahkamah Intelektual yang mengambil tema 'Mengupas Dugaan Korupsi di Pemprov DKI Jakarta' yang digelar di Jalan Karang Bolong, Jakarta Utara, Sabtu (29/8) sore.